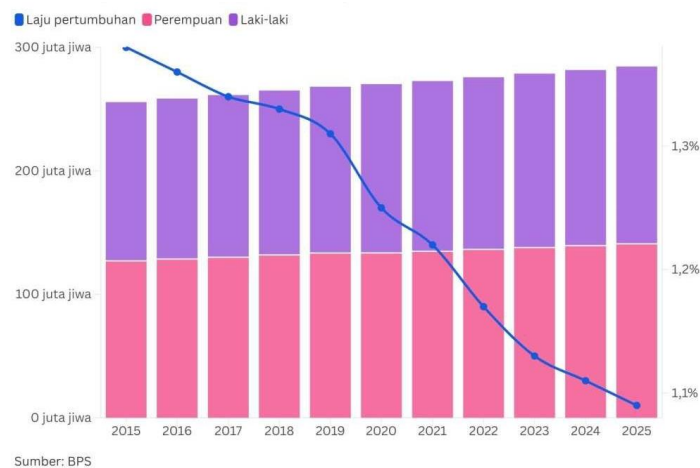


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data *Worldometer (2025)*, Indonesia menempati posisi ke-4 dalam peringkat negara dengan penduduk terbanyak di dunia, setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat dengan kepadatan penduduk sekitar 158 orang per km<sup>2</sup>. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian. Berikut disajikan data pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2025.



**Gambar 1.1** Pertumbuhan Serta Jumlah Penduduk di Indonesia pada Tahun 2015-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hal ini kemudian diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari rilis resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2025) yang memuat data jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2025.

Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa total penduduk Indonesia telah mencapai 286.693.693 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, yakni masing-masing sebesar 144.688.671 jiwa dan 142.005.022 jiwa.

“...Ditjen Dukcapil menyusun data kependudukan Semester I Tahun 2025 per 30 Juni 2025 sebanyak 286.693.693 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 1.752.156 jiwa dibanding Semester II 2024 yang sebesar 284.973.643 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 144.688.671 jiwa adalah penduduk laki-laki, dan 142.005.022 jiwa adalah penduduk perempuan” jelas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (28/8/25)

(Sumber: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan> diakses pada 26 September 2025).

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat merupakan tantangan dalam proses pembangunan nasional (Sajida & Yusuf, 2024). Dalam perspektif teori ekonomi penduduk, Jhingan (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dua sisi, yakni dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang terkendali berpotensi menyediakan tenaga kerja produktif dan menjadi modal sosial bagi pembangunan apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti meningkatnya kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan yang layak (Oktavianita et al., 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan pertumbuhan penduduk sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pembangunan manusia menjadi strategi utama untuk mengoptimalkan potensi demografis sekaligus menekan dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pembangunan manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional, karena manusia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam proses pembangunan yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Huda & Salam, 2024). Pembangunan yang berorientasi pada manusia juga mencakup penguatan keluarga dan masyarakat sebagai fondasi utama kesejahteraan bangsa, karena keluarga berperan penting dalam membentuk generasi produktif dan berdaya saing (Dewi et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas manusia perlu diarahkan tidak hanya pada aspek individu, tetapi juga pada penguatan peran keluarga sebagai pusat pembentukan nilai, karakter, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui program yang berkesinambungan dan berbasis masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk, serta penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan (Yunas & Nailufar, 2019).

Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan tersebut, BKKBN meluncurkan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) pada tahun 2016 sebagai inovasi berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga. Program ini kemudian ditransformasikan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas pada tahun 2020 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 843.4/2879/SJ (Sururi et al., 2023). Kehadiran Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat memperkuat sinergi antar sektor serta menjadi wadah kolaborasi pemerintah dan masyarakat hingga tingkat desa atau kelurahan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing (Sari, 2022). Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan keluarga, khususnya dalam bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2025 melaporkan bahwa Program Kampung Keluarga Berkualitas telah berkembang hingga mencakup 76.926 lokasi di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan implementasi kedua terbanyak setelah Jawa Tengah yakni mencapai 8.494 kampung. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan seluruh wilayah lainnya. Posisi ini menegaskan peran strategis Kota Surabaya sebagai pusat konsentrasi penduduk sekaligus wilayah prioritas dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Untuk memperkuat gambaran empiris tersebut, di bawah ini akan disajikan grafik sepuluh kabupaten/kota dengan jumlah penduduk

terbesar di Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan dominasi Kota Surabaya dibandingkan daerah lainnya sebagai berikut:



**Gambar 1.2** Jumlah Penduduk pada 10 Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbanyak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi tersebut menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah prioritas pengembangan Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh BKKBN Perwakilan Jawa Timur bersama Bapemas KB Kota Surabaya guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga (Grilda Sagita & Arif, 2024).

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, jumlah penduduk Kota Surabaya selama periode 2022-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Di bawah ini akan disajikan tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Surabaya dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2022-2025 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Surabaya  
Tahun 2022-2025

| <b>Tahun</b>     | <b>Jumlah Penduduk</b> |
|------------------|------------------------|
| 2022 Semester I  | 2.972.801              |
| 2022 Semester II | 2.987.863              |
| 2023 Semester I  | 3.009.286              |
| 2023 Semester II | 3.009.286              |
| 2024 Semester I  | 3.017.382              |
| 2024 Semester II | 3.018.022              |
| 2025 Semester I  | 3.008.760              |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya selama tahun 2022-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tren ini mengindikasikan adanya tekanan demografis yang semakin besar, sehingga menegaskan pentingnya pengelolaan kependudukan yang terencana serta penguatan pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga di Kota Surabaya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Program Kampung Keluarga Berkualitas telah diimplementasikan di seluruh kelurahan Kota Surabaya sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan pengelolaan program kependudukan. Hingga tahun 2025, tercatat 153 Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya dan meningkat pesat sejak 2023 setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022. Akselerasi pembentukannya terlihat dari 27 kampung pada 2017 menjadi 122 kampung pada 2023, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2** Jumlah Kampung keluarga Berkualitas di Kota Surabaya  
Tahun 2016-2024

| No.   | Kecamatan di Kota Surabaya | Tahun Pembentukan |      |      |      |      |      |      |      |      | Jumlah Kampung |
|-------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
|       |                            | 2016              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                |
| 1     | Asemrowo                   | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3              |
| 2     | Benowo                     | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 3     | Bubutan                    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 4     | Bulak                      | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 5     | Dukuh Pakis                | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 6     | Gayungan                   | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 7     | Genteng                    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 8     | Gubeng                     | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 9     | Gunung Anyar               | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 10    | Jambangan                  | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 11    | Karang Pilang              | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 12    | Kenjeran                   | 0                 | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 13    | Krembangan                 | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 14    | Lakarsantri                | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 15    | Mulyorejo                  | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 16    | Pabean Cantian             | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 17    | Pakal                      | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 18    | Rungkut                    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 19    | Sambikerep                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 4              |
| 20    | Sawahan                    | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 21    | Semampir                   | 0                 | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 5              |
| 22    | Simokerto                  | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 23    | Sukolilo                   | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 0    | 7              |
| 24    | Sukomanunggal              | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 25    | Tambaksari                 | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 0    | 8              |
| 26    | Tandes                     | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| 27    | Tegalsari                  | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 28    | Tenggilis Mejoyo           | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 29    | Wiyung                     | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 4              |
| 30    | Wonocolo                   | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5              |
| 31    | Wonokromo                  | 0                 | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 6              |
| Total |                            | 0                 | 27   | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 122  | 2    | 153            |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Dalam penyelenggaraan Program Kampung Keluarga Berkualitas, BKKBN melakukan pengelompokan kampung berdasarkan tingkat perkembangan

pelaksanaan program. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, klasifikasi tersebut terdiri atas empat kategori, yaitu Kampung Keluarga Berkualitas Dasar, Berkembang, Mandiri, dan Berkelanjutan. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan capaian indikator penyelenggaraan program, seperti komitmen pemangku kepentingan, integrasi lintas sektor, ketersediaan data keluarga, optimalisasi kelompok kegiatan (Poktan), serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Semakin tinggi klasifikasi yang diperoleh, semakin menunjukkan keberhasilan kampung dalam mengelola dan mempertahankan keberlanjutan Program Kampung Keluarga Berkualitas.

Kecamatan Tambaksari menjadi salah satu wilayah dengan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas terbanyak, yakni delapan kelurahan yang aktif melaksanakan program dan semua Kampung Keluarga Berkualitas sudah berkategori Kampung Keluarga Berkualitas dimana kategori tersebut adalah kategori tertinggi dalam klasifikasi BKKBN. Di bawah ini disajikan data klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Tambaksari, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. 3** Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Tambaksari Tahun 2025

| No    | Kecamatan –<br>TAMBAKSARI | Dasar  |   | Berkembang |   | Mandiri |   | Berkelanjutan |     |
|-------|---------------------------|--------|---|------------|---|---------|---|---------------|-----|
|       |                           | Jumlah | % | Jumlah     | % | Jumlah  | % | Jumlah        | %   |
| 1     | TAMBAKSARI                | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 2     | PLOSO                     | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 3     | GADING                    | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 4     | PACARKEMBANG              | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 5     | RANGKAH                   | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 6     | PACARKELING               | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 7     | KAPASMADYA<br>BARU        | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| 8     | DUKUH SETRO               | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 1             | 100 |
| Total |                           | 0      | 0 | 0          | 0 | 0       | 0 | 8             | 100 |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Data klasifikasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, tidak ada kampung yang berada di kategori Dasar, Berkembang, atau Mandiri, melainkan seluruhnya (8 kampung) masuk dalam kategori Berkelanjutan dengan presentase 100%. Di antara kelurahan tersebut, Kelurahan Kapasmadya Baru menonjol dengan Kampung Keluarga Berkualitas bernama WR Soepratman, yang memiliki rekam jejak implementasi paling lama.

Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman menjadi salah satu wilayah awal yang diresmikan sebagai percontohan Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah kecamatan Tambaksari pada tanggal 21 September 2017. Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas ini didasarkan pada karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi mencapai 40.450 jiwa dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) terbesar, yaitu 5.102 jiwa. Hingga kini Kampung KB WR Soepratman berstatus berkelanjutan selama enam tahun berturut-turut (2019-2025) menjadikannya salah satu Kampung Keluarga Berkualitas yang stabil di Kota Surabaya (BKKBN, 2025). Status keberlanjutan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat, serta efektivitas pengelolaan lintas sektor di tingkat kelurahan.

Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman yang berjalan di Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya menghadirkan sejumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (BKKBN, 2025). Setiap

kelompok diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sesuai segmen usia dan kebutuhan anggotanya, mulai dari pembinaan anak balita, pendampingan remaja, pemberdayaan lansia, hingga peningkatan ekonomi keluarga. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam masing-masing kelompok kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 4** Kelompok Kegiatan dan Bentuk Kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman

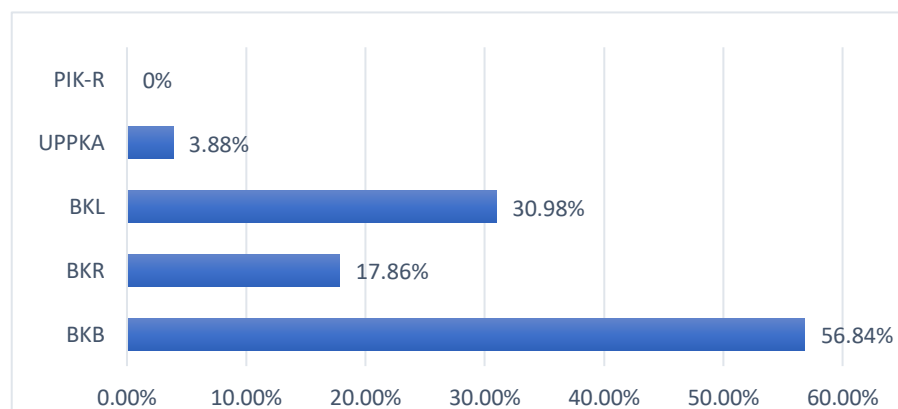
| No. | Kelompok Kegiatan (Poktan)                             | Bentuk Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bina Keluarga Balita (BKB)                             | Posyandu balita; pemberian makanan tambahan (PMT); rekreasi bagi balita stunting; bantuan sosial bagi ibu hamil dan balita stunting                                                                                                                 |
| 2.  | Bina Keluarga Remaja (BKR)                             | Penyuluhan bahaya NAPZA; penyuluhan pencegahan kenakalan remaja; edukasi kesehatan reproduksi remaja; penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini; pembinaan ketahanan keluarga dalam pendampingan remaja.                                           |
| 3.  | Bina Keluarga Lansia (BKL)                             | Senam lansia rutin; pemeriksaan kesehatan lansia (cek tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan); penyuluhan kesehatan lansia; kegiatan pengajian; rekreasi lansia; pemberian alat bantu seperti kursi roda bagi lansia yang membutuhkan. |
| 4.  | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Pelatihan keterampilan seperti memasak dan menjahit; pendampingan usaha keluarga; bantuan sarana usaha berupa gerobak usaha; pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga                                                                          |

Sumber: Kelurahan Kapasmadya Baru, 2026

Salah satu aspek keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat (Shodiq, 2022). Menurut Peraturan

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2023 program ini menetapkan lima indikator keberhasilan, yaitu komitmen kuat pengambil kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra, semangat serta komitmen pengurus Kampung Keluarga Berkualitas, dan partisipasi masyarakat yang intens. Partisipasi atau partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting bagi keberlanjutan pengelolaan program, karena berpengaruh langsung terhadap kinerja program dan proses pembangunan keluarga (Deswitasari, 2021). Partisipasi berarti kesediaan masyarakat membantu keberhasilan suatu kegiatan tanpa paksaan, dan tingkat partisipasi yang rendah mencerminkan rendahnya keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Sebagai gambaran kondisi partisipasi masyarakat di tingkat lokal, di bawah ini disajikan data persentase partisipasi dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman, yakni sebagai berikut:



**Gambar 1. 3** Persentase Partisipasi dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Kesenjangan partisipasi di Kapasmadya Baru semakin mencolok ketika dibandingkan dengan jumlah sasaran program wilayah tersebut. Di bawah ini akan di sajikan data sasaran program sesuai dengan jenis Kelompok Kegiatan (Poktan) Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. 5** Data Demografis Sesuai Dengan Jenis Kelompok Kegiatan (Poktan) Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman Tahun 2025

| <b>Jenis Kelompok Kegiatan</b>               | <b>Jumlah Sasaran Program</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Keluarga yang memiliki Balita                | 1.594                         |
| Keluarga yang Memiliki Remaja                | 4.731                         |
| Keluarga yang Memiliki Lansia                | 1.669                         |
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB | 4.127                         |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Data tersebut menunjukkan gambaran mengenai jumlah keluarga yang menjadi sasaran setiap kelompok kegiatan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai komposisi penduduk yang menjadi target program, di bawah ini disajikan data demografis berdasarkan jumlah individu dalam kategori balita, remaja, dan lansia sebagai berikut:

**Tabel 1. 6** Data Demografis Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman Tahun 2025

| <b>Kategori Penduduk</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------------------|---------------|
| Penduduk Balita          | 1.894         |
| Penduduk Remaja          | 6.308         |
| Penduduk Lansia          | 2.876         |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Berdasarkan data jumlah keluarga sasaran dan komposisi penduduk pada Tabel 1.5 dan 1.6, wilayah Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman memiliki 4.731 keluarga yang memiliki remaja dengan total 6.308 remaja, 4.127 Keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB, serta 1669 keluarga lansia

dengan jumlah 2.876 lansia. Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), dan lansia merupakan sasaran besar dalam intervensi program. Namun demikian, tingkat partisipasi BKL sebesar 30,98%, BKR 17,86%, dan UPPKA 3,88% masih relatif rendah dibandingkan besarnya jumlah sasaran yang menjadi target program.

Selain dipengaruhi oleh karakteristik sasaran program, partisipasi masyarakat juga tidak terlepas dari kapasitas pengelola program dalam menjalankan berbagai kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Di bawah ini akan disajikan data jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas pada setiap kelurahan di Kecamatan Tambaksari, yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. 7** Jumlah Pengelola Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas pada Setiap Kelurahan di Kecamatan Tambaksari Tahun 2026

| No. | Kelurahan       | Jumlah Kelompok Kerja (orang) |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| 1   | RANGKAH         | 18                            |
| 2   | PACARKELING     | 21                            |
| 3   | PLOSO           | 17                            |
| 4   | PACARKEMBANG    | 15                            |
| 5   | KAPASMADYA BARU | 9                             |
| 6   | TAMBAKSARI      | 17                            |
| 7   | GADING          | 21                            |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, Kelurahan Kapasmadya Baru memiliki jumlah Pokja paling sedikit, yaitu sebanyak 9 orang, sedangkan kelurahan lain memiliki 15 hingga 21 orang Pokja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman dijalankan dengan sumber daya pengelola yang relatif lebih terbatas dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Tambaksari.

Penelitian terdahulu oleh Grilda Sagita & Arif (2024) menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek koordinasi dan integrasi program lintas sektor. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang berbasis komunitas. Hasil observasi awal peneliti juga menunjukkan adanya ketimpangan antara capaian klasifikasi berkelanjutan yang diperoleh Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman dengan kondisi partisipasi masyarakat di lapangan.

Fenomena tersebut menjadi dasar pemilihan model partisipasi masyarakat Wilcox (1994), yang terdiri atas lima tingkatan partisipasi, yaitu *information*, *consultation*, *deciding together*, *acting together*, dan *supporting*. Pemilihan model ini didasarkan pada adanya indikasi permasalahan partisipasi pada setiap tingkatan. Pada tahap *information*, rendahnya partisipasi BKR dan UPPKA dibandingkan jumlah sasaran program mengindikasikan perlunya kajian mengenai bagaimana informasi program disampaikan dan menjangkau masyarakat. Pada tahap *consultation*, belum diketahui sejauh mana masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dalam pelaksanaan program. Pada tahap *deciding together*, jumlah Pokja yang relatif terbatas dibandingkan kelurahan lain menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Pada tahap *acting together*, perbedaan tingkat partisipasi antar kelompok kegiatan

menunjukkan perlunya kajian mengenai bentuk kerja sama antara masyarakat dan pengelola program dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pada tahap *supporting*, belum diketahui sejauh mana masyarakat mampu mengembangkan dan mempertahankan kegiatan secara mandiri untuk mendukung keberlanjutan program.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Deswitasari (2021) dan Shodiq (2022) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan program pembangunan berbasis komunitas, termasuk Program Kampung Keluarga Berkualitas. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari peran mereka dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program. Dalam konteks pembangunan keluarga, partisipasi masyarakat menjadi cerminan kepemilikan sosial (*sense of ownership*) terhadap program yang dapat memengaruhi keberlanjutan pelaksanaannya.

Meskipun demikian, penelitian mengenai Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman masih lebih banyak berfokus pada aspek implementasi program dan koordinasi lintas sektor. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman menggunakan model partisipasi Wilcox (1994). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan perspektif Wilcox untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif, mulai dari tahap pemberian *information* (memberikan

informasi), *consultation* (konsultasi), *deciding together* (pengambilan keputusan bersama), *acting together* (bertindak bersama), hingga *supporting* (dukungan).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas WR Soepratman dengan judul **"Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas 'WR Soepratman' di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji di penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas ‘WR Soepratman’ di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas ‘WR Soepratman’ di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengenai partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik, dan terhadap literatur yang ada mengenai program Kampung Keluarga Berkualitas dan layanan publik, khususnya di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan wawasan dan pemahaman konsep partisipasi masyarakat melalui implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas ‘WR Soepratman’ Kelurahan Kapasmadya Baru, Tambaksari, Surabaya.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan atau peningkatan dan penilaian implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas ‘WR Soepratman’ Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

### c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan laporan penelitian atau hasil penelitian. Laporan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi atau literatur untuk penelitian tambahan tentang partisipasi masyarakat.